



POTENSI MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN LOKAL DALAM PEMBERDAYAAN KELUARGA MISKIN DI PERDESAAN (STUDI KASUS KABUPATEN BONE)

THE POTENCY OF COMMUNITY AND LOCAL INSTITUTION TO EMPOWER THE POOR FAMILIES AT RURAL AREA CASE STUDY AT BONE

Bustang, Basita G. Sugihen, Margono Slamet, dan Djoko Susanto

Abstract

The aim of the research was intended to formulate the model of poor family Empowerment by determining both the level and the influencing factors of social responsibility and level of empowerment. Survey and interview techniques were implemented among 276 selected samples, started Nopember 2006 until April 2007. Data was analyzed by using both correlation and path analysis. The results indicated that a number of respondent had a high social responsibility and medium level of empowerment. The increase of social responsibility and level of empowerment were influenced by implementation of good government of local organization, income, and formal education. This study suggests an alternative model of empowerment in order to social responsibility and level of empowerment.

Key words: Potency, local instituiton, poor family.

Pendahuluan

Upaya pemerintah memerangi kemiskinan terus menerus dilakukan. Seiring dengan krisis ekonomi yang mulai melanda Indonesia sejak tahun 1997, jumlah penduduk miskin kembali meningkat (Bappenas, 2003). Pada rentang 1997 – 2002, jumlah penduduk miskin tertinggi terjadi pada tahun 1998, yakni 49,5 juta jiwa atau 24, 2 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Dengan kecenderungan semakin membaiknya perekonomian Indonesia, maka tingkat kemiskinan terus menerus mengalami penurunan secara bertahap. Bappenas (2005), tahun 2004 jumlah penduduk miskin sekitar 36,1 juta jiwa atau 16, 6 % dari total jumlah penduduk. Kemiskinan tersebut tersebar di perkotaan dan perdesaan dengan rincian: (a)

jumlah penduduk miskin di perkotaan 11,5 juta jiwa (12,6 %); (b) jumlah penduduk miskin dipedesaan 24, 6 juta jiwa (19,5 %).

Pemberdayaan masyarakat miskin melalui kegiatan produktif untuk meningkatkan posisi *bargaining* mereka terhadap semua bentuk eksploitasi dan subordinasi, tak pelak prasyarat yang dibutuhkan adalah kemudahan ekonomi (*economic facilities*) yang benar-benar nyata dan peluang-peluang sosial (*social opportunities*) yang memihak kepada masyarakat miskin (Bagong, 2003).

Untuk melakukan perubahan perilaku masyarakat perdesaan melalui proses pemberdayaan, sangat erat kaitannya dengan sejauh mana peran kelembagaan lokal di perdesaan itu sendiri dalam mendorong proses pembangunan perdesaan. Demikian

pula kelembagaan lokal di pedesaan dapat memberikan fasilitas agar perilaku pembangunan di lingkungan masyarakat miskin dapat tumbuh dan berkembang. Upaya-upaya untuk mendapatkan kemudahan sebagaimana disebutkan di atas, yang dilakukan oleh masyarakat miskin seringkali mengalami kegagalan. Salah satu hal yang menjadi faktor kegagalan lebih disebabkan kinerja birokrasi yang kurang maksimal.

Berbagai latar belakang pemikiran tersebut, maka penting dan perlu untuk dipikirkan suatu upaya memampukan (*empowering*) kelompok miskin yang ada di dalam lingkungan masyarakat pedesaan dengan melakukan upaya-upaya mengintegrasikan ke dalam kelembagaan lokal yang memiliki misi dan visi perubahan melalui pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana diyakini upaya berkelompok pada satuan individu miskin diduga lebih mengutamakan bagaimana hanya bisa bertahan untuk hidup tanpa memikirkan masa depannya. Oleh karena itu, perlu ada kearifan yang dapat melihat potensi serta faktor-faktor yang berpengaruh, mampu mendorong, memfasilitasi kesadaran (*awareness*) dan memunculkan kekuatan dirinya sendiri, untuk mengatasi ketidakberdayaan.

Dengan demikian untuk mengubah kondisi masyarakat miskin di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan dari ketidakberdayaan menjadi berdaya, maka penelitian ini penting menjawab rumusan permasalahan berikut: (1) Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap kemiskinan? (2) Bagaimana peran kelembagaan lokal, khususnya pada organisasi kemasyarakatan dan pemerintah lokal dalam pemberdayaan keluarga miskin? (3) Bagaimana tingkat aktualisasi perhatian dan tanggung jawab masyarakat dalam membantu keluarga atau kelompok miskin? (4) Apa potensi-potensi masyarakat yang dapat dikembangkan lebih lanjut dalam upaya memberdayakan kelompok masyarakat miskin? (5) Bagaimana tingkat keberdayaan kelompok masyarakat miskin? dan (6) Bagaimana model alternatif pemberdayaan keluarga miskin di pedesaan?.

Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) Menjelaskan pemahaman masyarakat terhadap kemiskinan, (2) Mengkaji peran kelembagaan lokal, khususnya pada organisasi kemasyarakatan dan pemerintah lokal dalam pemberdayaan keluarga miskin, (3) Menguraikan tingkat aktualisasi perhatian dan tanggung jawab masyarakat dalam membantu keluarga atau kelompok miskin? (4) Mengidentifikasi potensi-potensi masyarakat yang dapat dikembangkan lebih lanjut dalam upaya memberdayakan kelompok masyarakat miskin? (5) Menjelaskan tingkat keberdayaan kelompok masyarakat miskin, dan (6) Merumuskan model alternatif pemberdayaan keluarga miskin di pedesaan.

Metode Penelitian

Populasi

Populasi penelitian ini adalah seluruh anggota masyarakat Kabupaten Bone, yaitu individu yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah yang tinggal di wilayah pedesaan di Kabupaten Bone. Lokasi penelitian adalah tiga Kecamatan di Kabupaten Bone, yang diwakili oleh 3 (tiga) desa yaitu Desa Lemo Ape, Desa Ancu, dan Desa Maddenreng Pulu.

Sampel

Penentuan sampel dari populasi dilakukan dengan *cluster sampling*, jumlah sampel dihitung dengan rumus slovin sehingga diperoleh jumlah 276 responden. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Nopember 2006 sampai April 2007.

Analisis Data

Data primer diperoleh dengan mendatangi dan melakukan wawancara terhadap responden dengan berpedoman pada

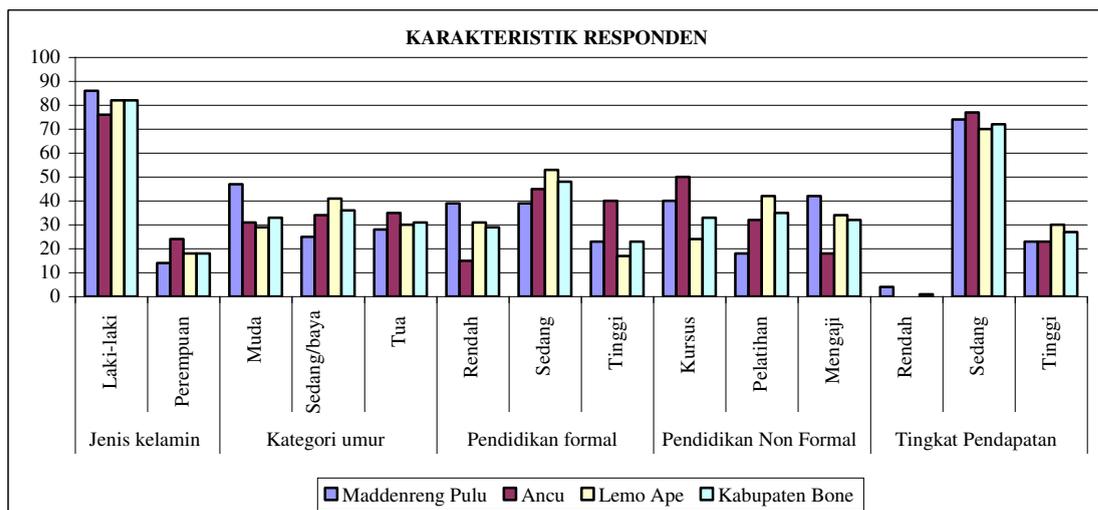
kuesioner yang kemudian akan diklarifikasi dengan wawancara mendalam dan wawancara bebas.. Data dianalisis dengan: analisis tabel silang chi square, analisis korelasi product moment, dan analisis jalur.

Hasil dan Pembahasan

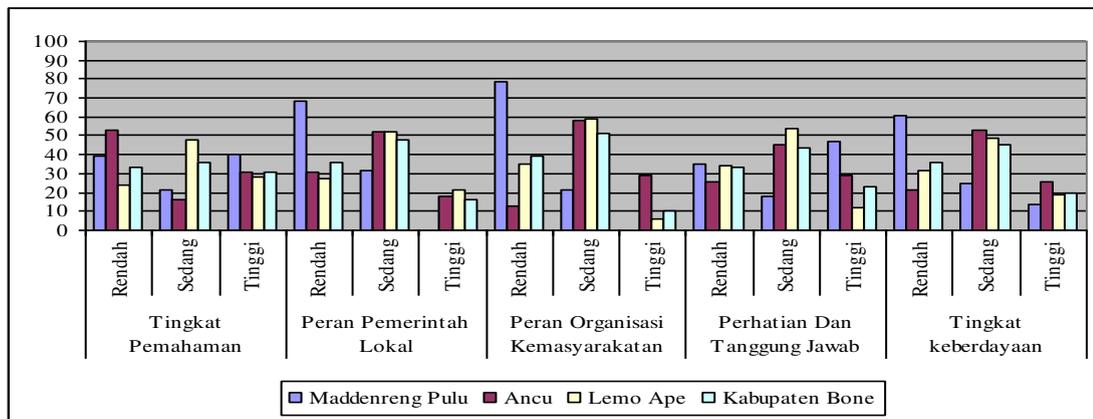
Karakteristik Responden

Karakteristik masyarakat Kabupaten Bone yang direpresentasikan oleh sebagian warga masyarakat di 3 (tiga) kecamatan dengan 3 (tiga) desa yaitu sebagai berikut: (1) Kecamatan Palakka-Desa lemo Ape, (2) Kecamatan Kajuara-Desa Ancu, dan (3) Kecamatan Patimpeng-Desa Maddareng Pulu. Karakteristik individu masyarakat yang diamati dalam penelitian ini meliputi: (1) Jenis kelamin, (2) Umur, (3) Pendidikan formal, (4) Pendidikan non formal, (5) Jenis pekerjaan, dan (6) Tingkat pendapatan. Beberapa deskripsi responden ditampilkan pada Gambar 1.

Sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki. Posisi laki-laki dalam masyarakat Kabupaten Bone merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Kelompok umur masyarakat mayoritas kategori sedang/baya dan muda, yang menggambarkan bahwa kelompok ini adalah anggota masyarakat yang berpotensi sebagai tenaga kerja produktif di desanya. Kemudian mayoritas penduduk pedesaan adalah kelompok yang belum mampu menyelesaikan pendidikan sampai tamat SLTA. Aktivitas pendidikan non formal yang diikuti pada umumnya adalah mengaji atau belajar ilmu agama (Islam), sedangkan bentuk-bentuk pendidikan non formal lainnya relatif lebih rendah. Tingkat pendapatan mayoritas responden adalah dalam kategori sedang. Umumnya kebutuhan pangan berasal dari hasil produksi menanam sendiri, jadi lebih banyak tidak dihitung sebagai pendapatan. Dinamika masyarakat dapat dilihat dari seberapa jauh interaksi sosial terjadi, dan mempengaruhi proses pemberdayaan. Kondisi tersebut ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 1. Deskripsi Karakteristik Responden



Gambar 2. Sebaran Responden Menurut Peubah Penelitian

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa masyarakat memiliki potensi untuk melakukan kegiatan pemberdayaan, terbukti bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap kemiskinan dan kepercayaan terhadap penanganan kemiskinan cukup baik, yang mengindikasikan bahwa kemiskinan dimaknai tidak saja pada kekurangan kebutuhan dasar manusia akan tetapi terkait juga dengan kebutuhan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, penyuluhan akan berimplikasi pada adanya kesadaran masyarakat bahwa penanganan masalah kemiskinan sebagai tanggung jawab semua pihak.

Peran kelembagaan lokal yang merupakan implementasi prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik belum optimal dijalankan khususnya pada organisasi masyarakat lokal maupun dan pemerintah lokal, yang ditunjukkan dari penilaian pada aspek-aspek akuntabilitas, transparansi, partisipasi, daya tanggap dan komitmen, masih kategori sedang dan rendah. Tingkat keberdayaan kelompok masyarakat miskin dikategorikan sedang, yang terindikasi pada aspek kemampuan pemenuhan kebutuhan primer, interaksi sosial dan perilaku dalam usaha.

Tingkat perhatian dan tanggung jawab sosial sebagian besar dalam kategori sedang dan mengarah pada kategori tinggi. Tingkat

aktualisasi perhatian dan tanggung jawab masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan cukup tinggi, yang diwujudkan dalam dua bentuk aktivitas utama yaitu kegiatan yang bersifat personal dan kegiatan yang bersifat kelompok atau kolektif.

Berdasarkan paparan tersebut dapat dipahami bahwa potensi masyarakat dalam membantu atau berperan dalam pemberdayaan kelompok miskin cukup besar. Potensi tersebut dapat diamati pada aspek-aspek berikut:

- (1) Terdapat pemahaman yang cukup tinggi bahwa kemiskinan tidak saja berdimensi fisik akan tetapi memiliki dimensi lain dalam hal ini adalah dimensi-dimensi non fisik. Selanjutnya sikap yang setuju bahwa kemiskinan adalah bagian dari masalah bersama sehingga kemiskinan perlu ditanggulangi secara bersama-sama. Dalam hal ini terdapat kesepakatan bahwa kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi semua komponen masyarakat memiliki kewajiban dan peran yang sama pentingnya. Dengan demikian apabila kondisi kewajiban bersama ini dapat dilaksanakan maka terdapat keyakinan yang besar bahwa kemiskinan akan dapat ditanggulangi melalui upaya-upaya pemberdayaan masyarakat miskin

secara sistematis dan berkesinambungan.

- (2) Faktanya terdapat aksi nyata yang umumnya dilaksanakan secara individu dalam membantu orang miskin. Pada masyarakat di ketiga desa menunjukkan bantuan-bantuan yang dilakukan secara individu telah dilaksanakan secara sukarela dalam bentuk sedekah atau bantuan langsung. Umumnya pelaksanaan bantuan tersebut tanpa koordinasi dan umumnya diberikan pada keluarga terdekat di samping kepada orang lain. Upaya-upaya bantuan secara kelompok melalui koordinasi oleh lembaga tertentu belum optimal dijalankan. Kondisi ini disebabkan antara lain oleh pemahaman bahwa yang dimaksud bantuan kepada kelompok miskin lebih efektif dilakukan sendiri, karena dapat diterima langsung kelompok miskin yang bersangkutan.

Model Alternatif Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kabupaten Bone

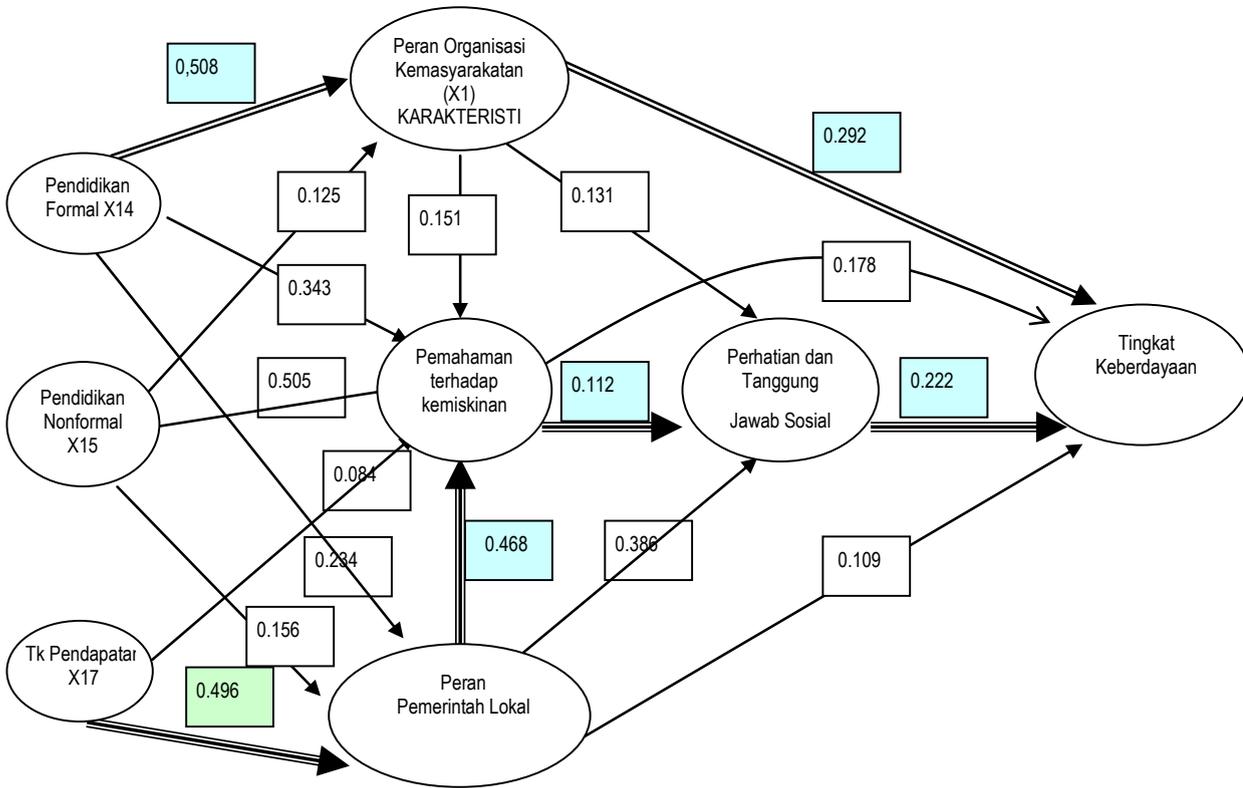
Model hubungan dan besarnya pengaruh faktor-faktor yang berpengaruh secara nyata terhadap pemahaman kemiskinan, dan peran kelembagaan lokal terhadap keberdayaan masyarakat miskin di Kabupaten Bone secara keseluruhan divisualisasikan pada Gambar 3.

Terdapat dua jalur alternatif yang efektif dalam meningkatkan keberdayaan keluarga miskin di Kabupaten Bone, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3. *Alternatif pertama*, tingkat keberdayaan keluarga miskin di Kabupaten Bone dapat dilakukan melalui strategi peningkatan perhatian dan tanggungjawab sosial khususnya pada aktivitas kelompok/kolektif. Hal yang perlu diperhatikan agar tanggungjawab sosial khususnya pada aktivitas kelompok/kolektif dapat optimal mendorong terciptanya masyarakat miskin yang berdaya, maka perlu ditempuh dengan meningkatkan pemahaman masyarakat

terhadap kemiskinan melalui peran organisasi pemerintah lokal dalam pemberdayaan keluarga miskin, khususnya mengenai transparansi dan partisipasi. Peningkatan peran organisasi pemerintahan lokal/desa dalam pemberdayaan keluarga miskin pada transparansi dan partisipasi dapat ditempuh melalui peningkatan atau perbaikan ekonomi masyarakat dengan mendorong kenaikan tingkat pendapatan keluarga miskin.

Sebagaimana ditunjukkan pada model empirikal pemberdayaan masyarakat miskin, pemahaman masyarakat terhadap kemiskinan secara nyata juga dapat ditingkatkan melalui pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal yang ditemukan dalam penelitian terkait dengan proses pendidikan agama (Islam) yang banyak dilaksanakan melalui mengaji di mushalla atau Masjid. Internalisasi nilai-nilai tanggungjawab sosial terhadap kelompok miskin sangat kuat, karena dipahami sebagai kewajiban individu yang bersifat transendental. Dengan demikian pendidikan nonformal secara faktual sangat penting dan urgen bagi pengembangan perilaku terkait tanggung jawab sosial kepada kelompok miskin.

Proses pembentukan perilaku terhadap kemiskinan memang terkait dengan pola pendidikan nonformal, di pedesaan, di Kabupaten Bone proses mengaji (belajar ilmu agama) telah melembaga dan merupakan media sosialisasi yang efektif. Tantangannya masih terdapat fakta bahwa aktualisasi tanggungjawab dan perhatian sosial masih terorientasi pada aktivitas individu atau personal. Kelembagaan lokal seperti musholla ataupun masjid, tempat sosialisasi nilai-nilai tanggung jawab dan perhatian sosial masih belum berperan efektif dalam mengkoordinasikan aksi bersama. Dalam konteks program yang jelas, berupa penyusunan program penyuluhan yang didukung oleh beberapa dinas terkait perlu diselenggarakan. Program penyuluhan harus berisi perlunya kepedulian sosial dan aksi-aksi yang bersifat individu atau personal dikoordinasikan dan menjadi suatu aksi bersama yang melembaga, memiliki target



Keterangan \Rightarrow : Jalur alternatif/prioritas pertama
 \Rightarrow : Jalur alternatif/prioritas kedua

Gambar 3: Model Empirikal Pemberdayaan Keluarga Miskin di Kabupaten Bone

sasaran yang jelas, dan tahapan kegiatan serta tujuan yang terukur dan jelas.

Penyelenggaraan penyuluhan dalam konteks ini perlu memperhatikan peran-peran kelembagaan lokal terutama kelembagaan religi, dan memberikan porsi serta posisi yang jelas dalam keseluruhan desain penyuluhan. Di samping itu aksi bersama harus berorientasi pada upaya-upaya produktif dengan memfasilitasi kelompok miskin untuk memiliki modal kerja, keterampilan kerja yang diperlukan, serta jaringan yang relevan terkait dengan produk atau jasa dari pekerjaan yang dihasilkan. Implikasi dari kondisi demikian adalah, perlunya pemerintah lokal memfasilitasi lembaga teknis dan non teknis untuk bersama-sama terlibat dan berkoordinasi secara nyata dan jelas.

Sebagaimana dipahami, perilaku tanggung jawab sosial yang sudah kondusif sebagai potensi, belum sepenuhnya memberikan pengaruh yang kuat terhadap aktualisasi dalam bentuk aktivitas individu maupun kelompok untuk membantu masyarakat miskin. Dalam konteks ini penguatan terhadap aktualisasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik pada pemerintah maupun organisasi masyarakat perlu dilakukan terus menerus. Penguatan terhadap implementasi tata pemerintahan yang baik, akan menjadi fasilitasi bagi individu untuk mencontohnya. Artinya, semakin baik persepsi dan keyakinan masyarakat bahwa organisasi masyarakat dan pemerintah lokal bersungguh-sungguh dalam menanggulangi kemiskinan, akan berdampak

pada motivasi diri untuk bersama-sama menanggulangi kemiskinan.

Alternatif Kedua, tingkat keberdayaan masyarakat miskin dapat dilakukan melalui strategi peningkatan peran organisasi kemasyarakatan dalam pemberdayaan keluarga miskin pada organisasi kemasyarakatan, khususnya mengenai transparansi dan partisipasi. Terkait dengan strategi tersebut, agar peran organisasi kemasyarakatan dalam pemberdayaan keluarga miskin pada organisasi kemasyarakatan khususnya mengenai transparansi dan partisipasi meningkat, maka harus diperhatikan faktor pendukungnya, yaitu tingkat pendidikan formal masyarakat miskin harus diperhatikan. Pada alternatif kedua, aspek yang mendapat tekanan adalah peran organisasi kemasyarakatan dan pendidikan formal, sehingga aspek-aspek lain yang cukup penting tidak diprioritaskan. Model pemberdayaan keluarga miskin di Kabupaten Bone dapat diarahkan berdasarkan tipologi desa yaitu desa dekat kota, desa pedalaman, dan desa pesisir. Pada dasarnya strategi yang diperlukan untuk memberdayakan keluarga miskin ada ketiga desa tersebut adalah sama yaitu melalui peningkatan perhatian dan tanggung jawab sosial.

Kesimpulan

1. Peran kelembagaan lokal yang merupakan implementasi prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada kelembagaan belum optimal dijalankan khususnya pada organisasi masyarakat lokal maupun dan pemerintah lokal, yang ditunjukkan dari penilaian pada aspek-aspek akuntabilitas, transparansi, partisipasi, daya tanggap dan komitmen, masih katagori sedang dan rendah.
2. Pada umumnya pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap kemiskinan dan kepercayaan terhadap penanggulangan kemiskinan cukup baik, yang mengindikasikan bahwa kemiskinan dimaknai tidak saja pada kekurangan pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek psikologis dan sosiologis terkait kebutuhan sosial kemasyarakatan dan harus menjadi tanggung jawab semua pihak, serta adanya keyakinan masalah kemiskinan dapat diatasi atau dapat diminimalkan.
3. Tingkat aktualisasi perhatian dan tanggung jawab masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan cukup tinggi, yang diwujudkan dalam dua bentuk aktivitas utama yaitu kegiatan yang bersifat individu dan kegiatan yang bersifat kelompok atau kolektif.
4. Tingkat keberdayaan kelompok masyarakat miskin dikategorikan sedang, yang terindikasikan pada aspek kemampuan pemenuhan kebutuhan primer, interaksi sosial dan perilaku dalam usaha.
5. Potensi-potensi masyarakat dalam mengatasi kemiskinan pada dasarnya terbagi dalam dua bentuk yaitu adanya pemahaman, nilai-nilai, sekaligus keyakinan, cara-cara dan kemampuan yang mengarahkan masyarakat untuk melakukan tindakan membantu pada kelompok kurang mampu dan aksi-aksi individu maupun kelompok atau kolektif dalam membantu kelompok miskin secara langsung.
6. Tingkat aktualisasi perhatian dan tanggung jawab sosial masyarakat terhadap kelompok miskin yang diwujudkan dalam bentuk aksi-aksi kolektif atau kelompok lebih memiliki dampak nyata pada aspek-aspek keberdayaan kelompok miskin yaitu kemampuan memenuhi kebutuhan primer, interaksi sosial, dan perilaku dalam usaha dibandingkan perwujudan dalam bentuk aksi-aksi individu.

Rujukan

- Bagong S. 2003. Kemiskinan di Jawa Timur Kenapa Meningkat. [Serial Online]. Tersedia pada: <http://KompasCyberMedia.Com/342689.htm>. Diakses pada 2 Juni 2003. Internet.
- Bappenas. 2003. *Peta Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: Bappenas.
- Bappenas 2005 *Penerapan Tata Pemerintahan Yang Baik. Sek PKN Tata Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Bappenas.
- Budi, Setia.1999. Dalam Jurnal Perencanaan Pembangunan “*Aparatur Pemerintah Yang Profesional: Dapatkah Diciptakan*” Jakarta: Bappenas.
- Solihin, Dadang. 2004. *Pembangunan Masyarakat Kota*. LPPM STIAKIN: Jakarta.
- Guhardja S., Herien P., Hartoyo, dan Dwi H. D. M. 1992. “Manajemen Sumber Daya Keluarga.” Diklat. Bogor: Jurusan GMSK Fakultas Pertanian IPB.
- Hasnida. 2007. ”Teori Keluarga”; Diperoleh dari: <http://library.usu.ac.id/modules.php> Diakses pada 11 Juni 2007. Internet
- Kotler, Philip dan Nancy Lee, 2005. *Corporate Social Responsibility*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Narayan. 2000. *Voices of The Poor Can Anyone Hear US*. Newyork: Oxford University Press of World Bank.
- Slamet, M. 2003. *Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Disunting oleh Ida Yustina dan Adjat Sudradjat. Bogor: IPB Press.
- Steers, Richard M., Porter, Lyman W., Bigley, Gregory A., 1991, *Motivation and Leadership at Work*. San Fransisco, USA: The Mcgraw-Hill Company.
- Suadah. 2005. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: UMM Press.
- Syaukani. 2003. *Akses dan Indikator Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik*. Jogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara.